

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan telah menjadi agenda global yang tercermin dalam *Sustainable Development Goals* atau *SDGs*. Dari 17 tujuan *SDGs*, beberapa tujuan yang secara langsung berhubungan dengan pengelolaan lingkungan kampus adalah tujuan 6 (air bersih dan sanitasi), tujuan 7 (energi bersih dan terjangkau), tujuan 11 (kota dan komunitas berkelanjutan), tujuan 13 (penanganan perubahan iklim), serta tujuan 14 dan 15 yang berfokus pada ekosistem. Tujuan-tujuan ini memberikan kerangka konkret bagi perguruan tinggi untuk mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan dalam operasional dan pendidikan mereka. Dengan mengadopsi tujuan-tujuan ini dalam kebijakan kampus, perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai institusi pendidikan tetapi juga sebagai agen perubahan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.



Gambar 1.1 *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Sumber: <https://www.koalisiperempuan.or.id/2016/06/07/sustainable-development-goals/>

Beberapa tahun terakhir, muncul isu lingkungan hidup menjadi salah satu masalah yang kompleks, urgen, dan penting untuk dibahas. Indonesia dikenal memiliki kekayaan alam yang melimpah, namun tidak sedikit masyarakat di Indonesia yang belum bisa menjaga dan merawat lingkungan dengan baik. Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan lingkungan yang semakin mendesak. Perubahan iklim mengarah pada peristiwa yang dapat merubah lingkungan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Berbagai aktivitas masyarakat telah menjadi penyebab dari terjadinya perubahan iklim di Indonesia.

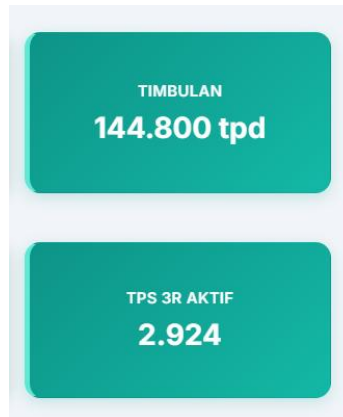


Gambar 1.2 Data Perubahan Iklim
Sumber: BMKG, 2025

Dampak dari perubahan iklim menimbulkan kekhawatiran. Ancaman dari perubahan iklim juga dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan gambar dari BMKG di atas bahwasanya terjadi peningkatan suhu udara rata-rata sebesar 0,2

derajat celcius secara umum di Indonesia. Hal ini mengindikasikan terjadinya fenomena pemanasan global yang berdampak pada ekosistem dan kehidupan masyarakat. Perubahan signifikan ini menjadikan respon institusional, termasuk dari perguruan tinggi, yang semakin mendesak. Sebagai pusat pengetahuan dan pusat inovasi, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan lingkungan melalui implementasi konsep *Green Campus*.

Sementara itu, Indonesia menghadapi berbagai permasalahan lingkungan yang mencerminkan buruknya tata kelola lingkungan, salah satunya tingginya produksi sampah. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) terbaru, produksi sampah di tingkat nasional mencapai 144.800 ton per hari. Konsekuensi dari kondisi ini adalah bertambahnya emisi gas rumah kaca, terutama metana, yang semakin memperburuk kondisi krisis iklim global. Tingginya jumlah timbulan sampah tersebut menunjukkan bahwa persoalan lingkungan masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi melalui implementasi konsep *Green Campus*.



Gambar 1.3 Data Timbulan Sampah tahun 2025

Sumber: SIPSN, 2025

Dalam upaya melaksanakan tujuan nasional yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, pembangunan nasional dilakukan sebagai serangkaian inisiatif berkelanjutan yang mencakup seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seiring dengan perkembangan suatu bangsa, keseimbangan antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial menjadi hal yang krusial dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Yusrie et al, 2021). Menjaga kelestarian lingkungan dengan tujuan mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sangatlah penting untuk memastikan keberlangsungan hidup mereka serta meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, lingkungan merupakan bentuk Rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dengan baik.

Secara yuridis, penerapan *Green Campus* didukung oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa setiap lembaga, termasuk

perguruan tinggi, memiliki tanggung jawab untuk turut berperan dalam upaya perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pembentukan sumber daya manusia, perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai penghasil gagasan dan inovasi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang menerapkan praktik berkelanjutan dalam operasional kampus. Penerapan kebijakan *Green Campus* di perguruan tinggi mencerminkan komitmen institusi terhadap nilai-nilai keberlanjutan lingkungan yang sejalan dengan prinsip administrasi publik.

Merespons tantangan global tersebut, konsep *Green Campus* telah berkembang sebagai manifestasi komitmen perguruan tinggi terhadap pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini perguruan tinggi semakin menyadari pentingnya mengintegrasikan konsep keberlanjutan dalam aktivitas dan pengembangan kampus, sehingga menciptakan konsep kampus hijau atau *Green Campus*. Implementasi kampus hijau bukan hanya menjadi tanggung jawab moral bagi perguruan tinggi, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas institusi tersebut.

Menurut Mayasari, et al (2016) konsep kampus hijau merupakan suatu sistem yang menerapkan prinsip ramah lingkungan dalam bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Konsep ini juga melibatkan seluruh warga kampus dalam berbagai kegiatan peduli lingkungan yang diharapkan mampu memberikan manfaat positif bagi aspek lingkungan, ekonomi, maupun sosial. Selain itu, *Green Campus* juga harus menjadi teladan dalam penerapan integrasi ilmu lingkungan pada

seluruh aspek pengelolaan kampus serta dalam praktik terbaik pembangunan berkelanjutan (Hudaini dalam Puspadi, 2016).

Penerapan kampus hijau merupakan salah satu langkah nyata dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya konsep ini, perguruan tinggi dapat berperan dalam membentuk generasi yang memiliki kesadaran tinggi terhadap isu-isu lingkungan dan mampu berkontribusi dalam mencari solusi terhadap permasalahan ekologis yang dihadapi masyarakat. Demikian, kampus hijau tidak hanya menjadi upaya pelestarian lingkungan, tetapi juga menjadi sarana edukasi yang membangun pola pikir berkelanjutan bagi mahasiswa dan seluruh civitas akademika.

Sebagai bentuk upaya dalam menekan dampak buruk terhadap lingkungan, perguruan tinggi di Indonesia diharapkan mampu mengambil peran aktif dalam menumbuhkan kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam (Jayadinata dkk., 2024). Penerapan konsep kampus hijau di lingkungan kampus juga dapat menjadi sarana bagi mahasiswa untuk memahami pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan sekaligus membiasakan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Memastikan bahwa konsep *Green Campus* dapat diterapkan dengan baik, maka perlu adanya suatu standar yang dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai sejauh mana sebuah kampus telah menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan. Standar ini berfungsi sebagai pedoman yang memungkinkan institusi

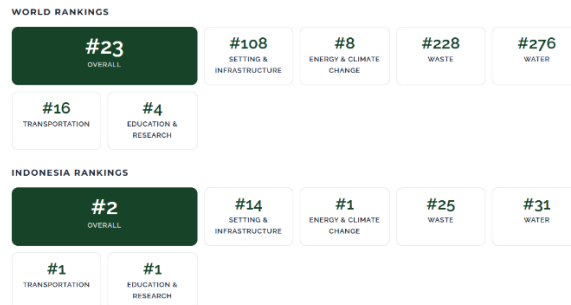
pendidikan untuk mengidentifikasi, mengukur, serta mengevaluasi upaya mereka dalam mewujudkan lingkungan kampus yang lebih hijau.

Saat ini, terdapat beberapa lembaga atau instansi yang telah mengeluarkan standar tertentu terkait penerapan konsep kampus hijau, salah satunya yaitu *UI GreenMetric*. *UI GreenMetric World University Rankings*, yang diinisiasi oleh Universitas Indonesia pada tahun 2010, telah menjadi standar internasional untuk mengukur komitmen dan upaya perguruan tinggi dalam keberlanjutan lingkungan.

UI GreenMetric memberikan gambaran komprehensif tentang keberlanjutan kampus, dengan menjadikan *UI GreenMetric* sebagai salah satu acuan, pemerintah memfasilitasi perguruan tinggi Indonesia untuk terus meningkatkan standar lingkungan mereka dan berkompetisi di tingkat internasional dalam hal implementasi kebijakan *Green Campus*. Dalam website resmi penilaian *UI GreenMetric* menetapkan beberapa indikator-indikator untuk mencapai kampus yang berwawasan lingkungan hidup. Indikator – indikator tersebut terdiri dari 6 (enam) program antara lain; (1) *setting and infrastructure*, (2) *energy and climate change*, (3) *waste*, (4) *water*, (5) *Transportation*, (6) *education and research*.

Mengkaji lebih mendalam terkait implementasi konsep tersebut pada salah satu perguruan tinggi yang telah menunjukkan komitmen nyata terhadap keberlanjutan lingkungan. Universitas Diponegoro atau biasa dikenal sebagai Undip merupakan salah satu institusi pendidikan tinggi di Indonesia yang telah menerapkan berbagai kebijakan

dan program kampus hijau secara konsisten dan berhasil meraih pengakuan di tingkat nasional maupun internasional.



Gambar 1.4 Peringkat Undip dalam *UI GreenMetric*
Sumber: <https://greenmetric.ui.ac.id/profile/university/undip.ac.id>

Komitmen Undip terhadap keberlanjutan lingkungan telah mendapatkan pengakuan internasional melalui penilaian *UI GreenMetric* 2025. Undip berhasil mencapai urutan ke-23 di dunia dan urutan ke-2 di Indonesia dengan perolehan rating 4.5, Adapun peringkat pertama diduduki oleh Universitas Indonesia dan peringkat setelah Undip ditempati oleh Univesitas Gadjah Mada.

CNT RANK	REG RANK	UNIVERSITY	TOTAL SCORE
1	1	Universitas Indonesia Indonesia, Asia	9262.5
2	4	Universitas Diponegoro Indonesia, Asia	9112.5
3	5	Universitas Gadjah Mada Indonesia, Asia	9050

Gambar 1.5 peringkat Undip dalam *UI GreenMetric*
Sumber: <https://greenmetric.ui.ac.id/profile/university/undip.ac.id>

Komitmen Undip terhadap keberlanjutan lingkungan secara formal telah tertulis dalam Rencana Strategi (Renstra) periode 2025-2029 yang disahkan lewat Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2024. Dalam dokumen tersebut, isu keberlanjutan ditegaskan sebagai salah satu dari 32 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran skor yang sangat spesifik. Selain itu, Renstra tersebut mengamanatkan agar sarana dan prasarana kampus senantiasa mengacu pada standar *UI GreenMetric* guna memenuhi kualifikasi sebagai kampus internasional. Penerapan kebijakan *Green Campus* di lingkungan Universitas Diponegoro bukan sekedar upaya mengejar peringkat dunia, melainkan sudah menjadi bagian mendasar dari visi strategis universitas yang terencana dan terukur dalam dokumen perencanaan jangka menengah universitas.

Komitmen Undip dalam mengimplementasikan kebijakan kampus hijau telah membuahkan hasil yang konsisten. Berdasarkan data resmi dari Undip, universitas ini telah berhasil mempertahankan prestasinya di *UI GreenMetric* selama lima tahun berturut-turut. Undip menunjukkan keunggulan dalam kategori *education and research* (peringkat 4 dunia dan 1 nasional) yang mencerminkan kuatnya integrasi aspek keberlanjutan dalam kurikulum dan penelitian. Selain itu, Undip juga berprestasi dalam kategori *energy and climate change* (peringkat 8 dunia dan 1 nasional), transportasi (peringkat 16 dunia dan 1 nasional), serta *setting and infrastructure* (peringkat 108 dunia dan 14 nasional).

Meskipun demikian, terdapat ruang untuk perbaikan dalam kategori *waste* (peringkat 228 dunia dan 25 nasional) dan *water* (peringkat 276 dunia dan 31 nasional). Data ini menunjukkan bahwa Undip telah berhasil mengimplementasikan kebijakan

kampus hijau, namun masih memerlukan evaluasi dan perbaikan pada aspek-aspek tertentu untuk meningkatkan keberlanjutan kampus secara menyeluruh.

Undip Fasilitas Sepeda Kampus: Realisasi Green Campus Untuk Wujudkan Lingkungan Nol Emisi

› 05/03/2024 📍 LPM OPINI ONLINE 📧 Agora, BULETIN MORPIN

Gambar 1.6 Berita Realisasi *Green Campus* UNDIP Sumber: LPM OPINI ONLINE (2024)

Implementasi kebijakan kampus hijau di Undip tidak hanya berhenti pada konseptual saja, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk program konkret. Salah satu contoh nyata yaitu program fasilitas sepeda kampus sebagai upaya mewujudkan lingkungan nol emisi. Melalui program ini, Undip tidak hanya menyediakan sarana transportasi ramah lingkungan bagi civitas akademika, tetapi juga secara aktif mendorong pengurangan penggunaan kendaraan bermotor di area kampus. Program sepeda kampus ini menjadi bagian dari strategi Undip dalam kategori transportation yang terbukti berkontribusi positif terhadap peringkat universitas dalam *UI GreenMetric*. Inisiatif ini menunjukkan bagaimana kebijakan kampus hijau diterjemahkan ke dalam tindakan praktis yang dapat dirasakan langsung oleh seluruh warga kampus, sekaligus menjadi contoh keberhasilan implementasi lingkungan di institusi perguruan tinggi.

UNDIP menunjukkan prestasi yang membanggakan dalam kategori *education and research* serta *energy and climate change*, data tersebut juga mengungkapkan

adanya tantangan signifikan dalam implementasi kebijakan kampus hijau, khususnya pada aspek *waste management dan water resources*. Peringkat yang relatif rendah dalam kedua kategori ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam sistem pengelolaan limbah dan konservasi air di lingkungan kampus.

Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan pengelolaan limbah dan sumber daya air belum optimal di Undip. Setelah mengulas komitmen dan capaian Undip dalam menerapkan konsep kampus hijau, penting untuk memahami proses implementasi kebijakan tersebut dari perspektif ilmu administrasi publik. Implementasi kebijakan merupakan fase krusial yang telah ditetapkan. Sebagai proses yang kompleks, implementasi kebijakan tidak hanya sekadar pelaksanaan teknis program, tetapi juga melibatkan berbagai aspek seperti komunikasi, sumber daya, disposisi implementor, dan struktur birokrasi.

Implementasi, menurut Mulyadi (2015:12) merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Proses ini merupakan bentuk pelaksanaan dari tujuan yang telah ditentukan dalam suatu keputusan, tujuannya adalah mengubah keputusan tersebut menjadi langkah-langkah operasional yang dapat dijalankan serta menghasilkan perubahan, baik dalam skala besar maupun kecil sesuai yang direncanakan. Implementasi juga mencerminkan upaya dalam memahami hasil yang seharusnya terjadi setelah suatu program dijalankan. Demikian, menurut Grindle (Mulyadi, 2015:47) menyatakan

bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Dalam memahami secara detail terkait implementasi kebijakan *Green Campus* di Universitas Diponegoro, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan dari George C. Edward III sebagai kerangka analisis utama. Model tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat unsur penting yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Model Edward III dipilih karena kemampuannya mengidentifikasi faktor yang menyebabkan kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dengan implementasi di lapangan, yang sangat relevan dengan fenomena di Undip di mana terdapat variasi keberhasilan implementasi antar kategori *Green Campus*. Kerangka teori ini akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi secara sistematis faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan *Green Campus* di Undip, sehingga dapat dihasilkan rekomendasi yang tepat sasaran untuk perbaikan di masa mendatang

Kajian mengenai *Green Campus* di Universitas Diponegoro sebenarnya sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Hapsari dkk (2014) yang membahas penerapan *Green Campus* Undip dari sudut pandang perencanaan dan penganggaran dengan pendekatan teknis dan ekonomi. Meskipun demikian, penelitian tersebut masih lebih menitikberatkan pada aspek teknik sehingga belum membahas secara mendalam proses implementasi kebijakan dari sudut pandang administrasi publik. Oleh karena itu, masih terdapat peluang untuk melakukan

penelitian secara mendalam terkait implementasi kebijakan *Green Campus* dari sudut pandang kebijakan publik.

Fenomena keberhasilan Undip dalam kategori *education and research* serta *energy and climate change*, namun menghadapi tantangan dalam *waste management* dan *water resources*, menunjukkan adanya kompleksitas dalam implementasi kebijakan yang perlu dikaji lebih mendalam. Kesenjangan capaian antar kategori ini berkaitan dengan perbedaan kondisi pada faktor penentu keberhasilan-faktor penentu keberhasilan implementasi, khususnya dari sisi kejelasan komunikasi antar unit pelaksana, keterbatasan sumber daya fasilitas, serta konsistensi prosedur dalam struktur birokrasi yang ada. Sejauh penelusuran peneliti, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi kebijakan *Green Campus* di Universitas Diponegoro menggunakan model implementasi kebijakan Edward III sebagai kerangka analisis utama. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut.

Berdasarkan gap penelitian yang telah diidentifikasi, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan mendasar terkait implementasi kebijakan *Green Campus* di Universitas Diponegoro. Secara spesifik, penelitian ini akan menganalisis faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan *Green Campus* di Universitas Diponegoro. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan *Green Campus*, penelitian ini akan menghasilkan rekomendasi nyata untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program lingkungan. Lebih luas lagi, temuan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi institusi pendidikan tinggi lain di Indonesia yang ingin mengembangkan atau menyempurnakan kebijakan *Green*

Campus mereka. Pada akhirnya, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada perbaikan tata kelola lingkungan di institusi pendidikan tinggi, tetapi juga mendukung agenda nasional dan global untuk pembangunan berkelanjutan melalui penguatan peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan dalam isu lingkungan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berikut beberapa permasalahan yang dapat dipaparkan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Adanya kesenjangan implementasi kebijakan *Green Campus* di Universitas Diponegoro, ditunjukkan dengan prestasi tinggi dalam kategori *education and research, transportation* serta *energy and climate change*, namun rendah dalam kategori *waste* dan *water* berdasarkan UI *GreenMetric*.
2. Belum optimalnya pengelolaan limbah dan pengelolaan air, belum adanya SOP yang terstandar secara merata pada beberapa unit pelaksana, serta masih rendahnya pemahaman dan kesadaran sebagian civitas akademika terhadap kebijakan *Green Campus*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan *Green Campus* di Universitas Diponegoro?

2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut?”

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu untuk

1. Menganalisis implementasi kebijakan *Green Campus* di Universitas Diponegoro.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan implementasi kebijakan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

A. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang administrasi publik dan kebijakan lingkungan hidup, memperkaya literatur tentang penerapan konsep *Green Campus* dari perspektif administrasi publik yang selama ini masih terbatas. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan *Green Campus* di lingkungan perguruan tinggi.

B. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi pihak Universitas Diponegoro dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan *Green Campus*. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi universitas-universitas lain dalam menerapkan kebijakan serupa, guna menciptakan lingkungan kampus yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

1.6 Kajian Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Teori	Metode	Hasil
1.	Penerapan Kebijakan <i>Green Campus</i> Pada Perguruan Tinggi di Surabaya. Johanes, dkk.	Pengertian <i>Green Campus</i> atau kampus hijau dalam pelestarian lingkungan kampus tidak selalu mengenai lingkungan di sekitar kampus yang dipenuhi pepohonan maupun identik dengan warna hijau, namun makna kampus hijau dapat dimaknai lebih luas, yakni sejauh mana warga kampus mampu memanfaatkan sumberdaya yang ada di lingkungan kampus secara efektif dan efisien (Gatot Suhirman, 2017).	Metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan masalah secara kualitatif guna melihat implementasi dan kendala penerapan <i>Green Campus</i> pada kelompok sasaran.	Penelitian ini meneliti penerapan kebijakan <i>Green Campus</i> di empat perguruan tinggi Surabaya (UKDC, Universitas Dinamika, Universitas Narotama, dan STTAL). Hasilnya menunjukkan bahwa setiap kampus telah menerapkan program <i>Green Campus</i> dengan pendekatan yang berbeda. Faktor kunci keberhasilan adalah adanya alokasi dana, integrasi program lintas civitas akademika, dan sosialisasi berkelanjutan.
2.	Implementasi Program UNS <i>Green Campus</i> dalam menghadapi perubahan iklim. Ida Nugroho S, Ayu Intan S, Budi Siswanto, Waluyo.	Teori pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, (Unesco, 2012). <ul style="list-style-type: none"> Menekankan pentingnya integrasi prinsip keberlanjutan ke dalam sistem pendidikan. 	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Universitas Sebelas Maret (UNS).	UNS telah menerapkan program <i>Green Campus</i> sejak 2013 untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan menghadapi perubahan iklim. Kegiatannya meliputi hari bebas emisi, pembuatan taman, pengelolaan sampah, penggunaan paving block, transportasi ramah lingkungan, dan pengurangan plastik. Meski pelaksanaannya cukup baik, tantangan terbesar adalah mengubah pola pikir dan perilaku warga kampus agar lebih peduli lingkungan

	SHEs: Conference Series (2022).	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Green Campus</i> adalah bagian konkret dari penerapan ESD di tingkat perguruan tinggi. 		
3.	<p>Pengembangan teknis operasional pengelolaan sampah di kampus A Universitas Trisakti menggunakan penilaian <i>UI GreenMetric</i> kategori limbah.</p> <p>A. B. Barka, Ratnaningsih, H Yulinawati.</p> <p>Jurnal Sosial dan Teknologi (Sostech), 2023.</p>	Salah satu implementasi dalam merealisasikan pembangunan berkelanjutan saat ini adalah dengan menerapkan konsep <i>Green Campus</i> (Fitria et al., 2016). <i>Green Campus</i> adalah konsep kawasan pendidikan yang memperhatikan masalah lingkungan (Puspadi et al., 2016)	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluatif melalui tiga tahap: (1) studi literatur dan observasi lapangan, (2) pengumpulan data primer (operasional pengelolaan sampah) dan sekunder (populasi, peta kampus, komposisi sampah), serta (3) analisis data berdasarkan indikator UI <i>GreenMetric</i> kategori limbah.</p>	Kampus A Universitas Trisakti mendapat skor 600 untuk kategori limbah pada UI <i>GreenMetric</i> 2020. Setelah evaluasi, direncanakan peningkatan pengelolaan dengan pemilahan sampah di sumber yang dapat mengurangi timbulan hingga 63,4% dan pemrosesan sisanya menjadi kompos dan briket energi. Targetnya, skor meningkat menjadi 1500 pada 2023.
4.	Implementasi Smart and <i>Green University</i> pada Universitas	Menurut Tan et al. (2013), konsep kampus hijau berasal dari teori operasi universitas	Pendekatan kualitatif	Implementasi program <i>Green Campus</i> masih belum optimal. Upaya pengawasan tidak memiliki kejelasan mengenai siapa yang

	<p>Sultan Ageng Tirtayasa Banten</p> <p>Sahala Mimbar Y., Hasuri W. Indonesian Journal of Social and Political Sciences, (2024).</p>	<p>yang didasarkan pada konsep pembangunan berkelanjutan. Mereka mengatakan bahwa semua aktivitas di universitas harus diorganisir dan dijalankan dengan mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang universitas.</p>		<p>bertanggung jawab. UPT Smart Green dan SDGs juga tidak dapat melakukan pengawasan yang efektif, karena tidak memiliki kewenangan. Upaya internalisasi yang dilakukan oleh UPT Smart Green dan SDGs tidak efektif. Sarana dan prasarana pendukung program <i>Green Campus</i> di seluruh kampus Untirta masih belum memadai. Anggaran untuk unit ini masih kurang memadai. Upaya sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman tentang program <i>Green Campus</i> masih kurang. Kurangnya kesiapan tenaga mediator antara pimpinan dengan pemangku kepentingan paling bawah. Beberapa aspek dari 6 kriteria kampus hijau perlu ditingkatkan untuk mencapai target. Internalisasi nilai-nilai kampus hijau di kalangan warga kampus masih kurang, terutama di kalangan dosen dan mahasiswa.</p>
5.	<p>Penataan jalur pejalan kaki untuk mendukung <i>Green Campus</i> di kampus Universitas Diponegoro Tembalang.</p> <p>Nararya Adi Prasetya, P. Purwanto, Maryono Maryono. Jurnal Lingkungan, vol 5(1), 2021.</p>	<p>Merujuk pada konsep kampus yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, dengan prinsip mengurangi dampak lingkungan melalui perencanaan, kebijakan, dan infrastruktur yang mendukung gaya hidup hijau.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Green Campus</i> sering dikaitkan dengan konsep <i>environmental management</i> dan <i>eco-campus planning</i>. 	<p>Penelitian ini menggunakan observasi langsung dan analisis deskriptif terhadap jalur pejalan kaki di Kampus Universitas Diponegoro (UNDIP) Tembalang, Semarang.</p>	<p>Jalur pejalan kaki di UNDIP sudah memiliki vegetasi peneduh namun belum seluruhnya nyaman dan aman untuk digunakan. Diperlukan penyesuaian desain, penambahan fasilitas (seperti tempat duduk dan guiding block), serta peningkatan konektivitas antarjalur agar mendukung terciptanya <i>Green Campus</i> yang ramah pejalan kaki.</p>

		Sumber: Wimala et al (2016), Leal Filho et al (2015). Marrone et al (2018).		
6.	<p>Studi Perencanaan dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Bengkulu sebagai <i>Green Kampus</i>.</p> <p>Preety Maggiesty R, Geby F, dkk. Jurnal Ilmiah Multidisplin Indonesia, (2025).</p>	<p>Santoso et al (2017), menjelaskan bahwa <i>Green Campus</i> merupakan upaya untuk menciptakan kampus yang ramah lingkungan dengan memperhatikan pengelolaan sumber daya alam, pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, serta penerapan nilai-nilai keberlanjutan dalam setiap aspek kehidupan kampus.</p>	Deskriptif kualitatif dan kuantitatif	<p>UMB menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan ruang terbuka hijau yang hanya mencakup 15% dari total luas kampus, pengelolaan sampah yang belum optimal, serta rendahnya kesadaran civitas akademika terhadap isu keberlanjutan lingkungan. Meskipun demikian, terdapat sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan, seperti pemanfaatan teknologi energi terbarukan, dukungan kebijakan pemerintah yang semakin mendukung inisiatif ramah lingkungan, serta potensi kolaborasi dengan mitra eksternal, baik dari sektor swasta maupun lembaga pemerintahan.</p>
7.	<p>Peranan Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.</p> <p>Kuryahadi. Jurnal Pendidikan dan Konseling (2022).</p>	<p>Menurut Akbal, kebijakan hukum lingkungan hidup pemerintah Indonesia di era otonomi daerah termasuk dalam kategori kebijakan publik, karena menyangkut kehidupan masyarakat untuk atau untuk kepentingan umum (Rohimin, 2019).</p>	Menggunakan pendekatan kualitatif.	<p>Kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang tidak terkendali terus meningkat. Penegakan hukum lingkungan yang tegas, sumber daya manusia yang berkualitas, serta penerapan etika lingkungan sangat penting untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Integrasi kebijakan pembangunan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.</p>
8.	<p>Persepsi Mahasiswa Terhadap program <i>Green Campus</i></p>	<p>Beberapa indikator dalam penerapan program <i>Green Campus</i> meliputi pengelolaan</p>	metode kuantitatif deskriptif.	<p>Mahasiswa UM memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai program <i>Green Campus</i>. Hal tersebut terlihat dari tingginya komitmen</p>

	<p>dalam Mewujudkan Perguruan Tinggi yang Berkelanjutan (studi kasus: Universitas Negeri Malang).</p> <p>Robby Hilmi R, Sumarmi, dkk. Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan, (2024).</p>	<p>dan penataan bangunan beserta infrastruktur, pengelolaan energi berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, pengelolaan sampah dan air, sistem transportasi, hingga pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p>		<p>mahasiswa dalam mendukung terciptanya lingkungan kampus yang berkelanjutan. Selain itu, mahasiswa juga menilai bahwa upaya menjaga kelestarian lingkungan mampu memberikan dampak positif terhadap kualitas pembelajaran serta menciptakan suasana yang lebih nyaman di area kampus. Meskipun demikian, diperlukan adanya kajian khusus dan regulasi yang lebih jelas terkait keberlanjutan lingkungan yang melibatkan seluruh civitas akademika.</p>
9.	<p>Strategi Mewujudkan Kampus Hijau Melalui Transportasi Berkelanjutan Menurut <i>UI GreenMetric</i> di Kampus Politeknik Negeri Medan.</p> <p>Afdhal Hubbiq, Alizar Hasan, dkk Jurnal Sipil (2024).</p>	<p>Penelitian ini dilandasi konsep kampus hijau (<i>Green Campus</i>) yang dikembangkan oleh Universitas Indonesia melalui program <i>UI GreenMetric World University Ranking</i> sejak 2010.</p>	<p>Metode kualitatif dan kuantitatif</p>	<p>Berdasarkan indikator <i>UI GrreenMetric</i>, ketersediaan sistem transportasi ramah lingkungan di Kawasan kampus Polmed masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari belum adanya kebijakan kendaraan bebas emisi seerta minimnya upaya pengurangan penggunaan kendaraan pribadi di area kampus. Program pembatasan lahan parkir selama tiga tahun terakhir telah menurunkan kapasitas area parkir sekitar 10-30%. Jalur pejalan kaki memang telah tersedia, namun belum seluruhnya memenuhi aspek kenyamanan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya seperti peningkatan penggunaan kendaraan listrik, pengembangan jalur pedestrian yang aman dan nyaman serta penataan area parkir secara lebih efektif.</p>
10.	<p>Penguatan keterlibatan warga negara dalam</p>	<p>Penelitian ini didasarkan pada konsep Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya</p>	<p>Metode kualitatif</p>	<p>Program <i>Go Green</i> di Kampung Ekologi Batu berhasil menciptakan sinergi ekonomi dan</p>

	<p>pembangunan berkelanjutan melalui program <i>go green</i></p> <p>Ludovikus Bomans W, Iskandar Ladamay, Nita Fitriya.</p> <p>Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (2020).</p>	<p>tiga komponen utama: <i>Civic Knowledge</i> (pengetahuan), <i>Civic Skill</i> (keterampilan), dan <i>Civic Disposition</i> (sikap). Ketiga aspek tersebut digunakan untuk mendorong tumbuhnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif.</p>		<p>lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, melalui dua tahap utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan lingkungan (sosialisasi dan workshop); 2. Pengelolaan lingkungan (menanam, daur ulang, kompos, biopori, bazar sehat). <p>Partisipasi aktif warga mulai terbentuk, meski masih ada tantangan dalam membangun kesadaran secara menyeluruh.</p>
11.	<p>Sinergi kebijakan ekonomi dan lingkungan: menuju pembangunan berkelanjutan <i>synergy of economic and environmental policies: towards sustainable development.</i></p> <p>Muhammad Anzarach, Taufiqurokhman. Pencerah Publik, 2024.</p>	<p>Teori instrument ekonomi lingkungan Referensi: Copeland&Taylor (2014), Barbier&Burgess (2017), Hartono (2023).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan peran insentif ekonomi seperti pajak karbon dan subsidi energi terbarukan sebagai cara untuk menginternalisasi eksternalitas lingkungan. • Sering dikaitkan dengan pendekatan ekonomi neoklasik dalam <i>environmental economics</i> 	<p>Penelitian ini menggunakan systematic literature review (SLR) terhadap 500 artikel dari database Scopus, dianalisis dengan aplikasi Vosviewer untuk memetakan hubungan konsep dan tren terkait sinergi kebijakan ekonomi dan lingkungan.</p>	<p>Penelitian ini menemukan bahwa integrasi kebijakan ekonomi dan lingkungan, seperti penerapan pajak karbon dan subsidi energi terbarukan, mampu mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi antar sektor dan inovasi teknologi hijau juga dinilai memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan.</p>
12.	<p>Strategy to Reduce the Use of Private</p>	<p>Penelitian ini dilandasi oleh teori transportasi berkelanjutan</p>	<p>Metode kualitatif dan kuantitatif</p>	<p>Penelitian ini mengungkap fenomena menarik tentang penggunaan transportasi di lingkungan</p>

	<p>Cars and Motorbikes to Campus to Support the <i>Green Campus</i> Program.</p> <p>Titi K, Yossyafra, Rahimmah A. <i>Andalusian International Journal</i>, 2023.</p>	<p>dan konsep kampus hijau (<i>Green Campus</i>). Dalam konteks ini, peneliti mengangkat isu emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi yang berkontribusi signifikan terhadap pemanasan global. Salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan universitas adalah membatasi penggunaan kendaraan pribadi di lingkungan kampus.</p>		<p>kampus. Setiap harinya, sekitar 12.00 kendaraan memasuki area kampus, didominasi oleh sepeda motor yang mencapai 80%, diikuti kendaraan ringan sebesar 19,35% dan hanya 0,65% adalah bus.</p>
13.	<p>Strategy to Create a <i>Green Campus</i> Through Sustainable Transportation According to UI GreenMetric at Medan State Polytechnic Campus.</p> <p>Afdhal H, Bahrul A, dkk. <i>International Journal of Architecture and Urbanism</i>, 2024.</p>	<p>Penelitian ini dilandasi konsep kampus hijau (<i>Green Campus</i>) yang dikembangkan oleh Universitas Indonesia melalui program <i>UI GreenMetric World University Ranking</i> sejak 2010. Tujuan utamanya adalah menciptakan survei yang mendeskripsikan program berkelanjutan di perguruan tinggi dengan fokus pada aspek transportasi ramah lingkungan.</p>	<p>Metode kualitatif dan kuantitatif</p>	<p>Polmed masih memiliki tantangan signifikan dalam mewujudkan konsep kampus hijau, terutama pada aspek transportasi. Diperlukan upaya komprehensif dan sistematis untuk meningkatkan kinerja transportasi berkelanjutan guna mencapai target <i>Green Campus</i> di tahun 2025.</p>
14.	<p>An Assesment on <i>Green Campus</i> Rating of the University of Lampung Main Campus.</p>	<p>Menurut Gunagam, Naurah, dan Prabono (2022) untuk meningkatkan kinerja kampus, perlu melibatkan ahli dalam pengembangan kebijakan dan rencana induk, dalam desain</p>	<p>Metode kuantitatif dengan studi pendekatan studi kasus</p>	<p>Hasil penilaian tersebut menghasilkan perumusan serangkaian solusi manajemen bebas biaya yang bertujuan untuk mengubah area kampus menjadi lingkungan kampus yang hijau. Dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pergerakan, dan konektivitas, serta kriteria</p>

	Ika K, Esther E, dkk. Journal of Engineering and Scientific Research, 2024.	dan konstruksi infrastruktur, bangunan dan fasilitas,serta perlu mengakui peran semua stakeholder dalam mempraktikan prinsip berkelanjutan.		ekologi, diharapkan skor akan meningkat sebesar 22 poin, menghasilkan dalam Peringkat Perak yang dapat dicapai.
15.	Implementasi <i>Green Accounting</i> pada UG Technopark Sebagai Wujud <i>Green Campus</i> Berkelanjutan. Dini Andriyani. Journal of Trends Economics and Accounting Reseach, 2023.	Menurut Kusumaningtias (2013), menjelaskan bahwa <i>green accounting</i> merupakan bagian dari akuntansi yang mencakup proses identifikasi, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan biaya yang berkaitan dengan aktivitas lingkungan Perusahaan. Biaya lingkungan pada dasarnya berkaitan dengan biaya produk, proses, sistem, maupun fasilitas yang digunakan dalam pengambilan keputusan manajemen.	Metode kualitatif	UG Technopark telah mengakui adanya biaya lingkungan, meskipun pengelompokannya belum dilakukan secara khusus. Pengukuran biaya lingkungan dilakukan mnggunakan satuan moneter berdasarkan realisasi anggaran periode sebelumnya. Selain itu, pengungkapan mengenai aspek lingkungan dalam laporan keuangan belum diatur secara spesifik sehingga penerapannya masih disesuaikan dengan kebijakan masing-masing Perusahaan.
16.	Evaluasi Penerapan <i>Green Campus</i> pada Pemeringkatan <i>UI GreenMetric World University Rankings</i> di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Fajrul Falakh.	Menurut Tiyarattanachai (2016) menjelaskan bahwa penerapan konsep kampus berkelanjutan di perguruan tinggi dapat mendorong perubahan pola pikir masyarakat kampus agar lebih bijak dan peduli dalam menjaga lingkungan.	Metode kualitatif dengan pendekatan rasionalistik	Keberlanjutan program <i>gren campus</i> perlu didukung melalui penyusunan kebijakan khusus yang selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu, diperlukan program-program terukur dan berkelanjutan agar peningkatan peringkat kampus dapat terus dicapai pada tahun-tahun berikutnya.

	Journal of Environmental Sustainability, 2020.			
17.	<p>Manajemen Paradigma dan Perilaku: Upaya Bergerak Menuju Kemajuan Pelaksanaan Program <i>Green Campus</i>.</p> <p>Raditia Y., P, Shintia N., K, Danisa K. Faktor penentu keberhasilan: Jurnal Kajian Sosiologi, 2020.</p>	Menurut Puspadi, dkk (2016), hambatan utama dalam implementasi <i>Green Campus</i> berasal dari lemahnya kebijakan pimpinan kampus, rendahnya tingkat pemahaman civitas akademika mengenai konsep <i>Green Campus</i> , serta belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan.	Metode kualitatif dengan data primer dan sekunder	Paradigma biosentris dan deep ecology dipandang sebagai pendekatan yang penting untuk mendukung perkembangan program <i>Green Campus</i> . Selain itu, penerapan <i>theory of planned behavior</i> menunjukkan bahwa perilaku masyarakat kampus memiliki peran besar dalam keberhasilan program tersebut. Keberhasilan <i>Green Campus</i> juga dipengaruhi oleh penyusunan strategi yang memperhatikan paradigma lingkungan, perilaku masyarakat, serta kesiapan sumber daya di perguruan tinggi.

Dari tinjauan terhadap tujuh belas penelitian terdahulu, ada beberapa kesimpulan penting yang dapat ditarik. Pertama, sebagian besar penelitian *Green Campus* berfokus pada aspek teknis dan fisik seperti pengelolaan sampah, transportasi, dan infrastruktur, tanpa mengintegrasikan perspektif administrasi publik secara mendalam. Kedua, penelitian yang menggunakan pendekatan kebijakan publik pada umumnya bersifat *evaluative* terhadap program tertentu, bukan menganalisis proses implementasi secara menyeluruh. Ketiga, penelitian tentang *Green Campus* di Universitas Diponegoro yang ada sejauh ini lebih bersifat teknik atau fisik seperti penataan jalur pejalan kaki, bukan suatu analisis proses kebijakan. Dari pengamatan ini teridentifikasi *gap* penelitian yang signifikan, yaitu belum adanya kajian yang secara komprehensif menganalisis faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan *Green Campus* di Universitas Diponegoro dari perspektif administrasi publik, khususnya dengan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III.

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi dipahami sebagai suatu bentuk kerja sama. Istilah administrasi berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu (Silalahi, 2010:8). Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut (Siagian, 2004) menjelaskan bahwa administrasi merupakan keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang dilandasi oleh rasionalitas guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu, menurut David H. Rosenbloom (dalam Pasolong, 2012:56) menyatakan bahwa administrasi publik adalah pemanfaatan

teori serta proses manajemen, politik, dan hukum dalam menjalankan fungsi pemerintahan, baik di bidang legislatif maupun eksekutif, khususnya dalam pelaksanaan fungsi pengaturan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya Waldo dalam Pasolong (2008:8) menyebutkan bahwa administrasi publik merupakan manajemen dan organisasi dari banyaknya manusia dan peralatannya berguna untuk memenuhi tujuan pemerintahan. Berdasarkan beberapa ahli dari penjelasan administrasi publik dapat disimpulkan yaitu keseluruhan proses manajemen yang dijalankan oleh beberapa kelompok orang dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan fungsi pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ilmu administrasi publik saat ini telah menyebar luas, hal ini terbukti dengan keahliannya dalam menangani masalah-masalah dalam masyarakat serta dijadikan formulasi ke dalam rumusan kebijakan.

Menurut McDury dalam Yuniningsih (2025), administrasi publik dapat dipahami melalui perspektif politik, di mana hal ini menjadi cara bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya di wilayah yang berstatus sebagai negara. Administrasi publik mencerminkan bagaimana negara menggunakan kewenangannya dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Sementara itu, Barton dan Chappel dalam Yuniningsih (2025) menyoroti bahwa administrasi publik lebih menitikberatkan pada aktivitas pemerintah dalam memberikan layanan kepada warga negara, dengan fokus pada peran aparatur pemerintahan sebagai pelaksana kebijakan publik.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Frederick A. Cleveland dalam Yuniningsih (2025) menyebutkan bahwa administrasi publik berperan penting dalam pemberdayaan sosial serta dalam membangun prinsip demokrasi yang terstruktur. Administrasi publik tidak hanya berfokus pada pelayanan, tetapi juga berupaya memberdayakan masyarakat agar dapat turut serta mengambil bagian dalam pelaksanaan sebagian tanggung jawab pemerintahan. Oleh karena itu, administrasi publik yang baik harus berlandaskan prinsip profesionalisme, efisiensi, dan efektivitas.

Lebih jauh, Pasolong dalam Yuniningsih (2025) mengungkapkan bahwa administrasi publik merupakan aktivitas kerja sama antar kelompok atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Selaras dengan hal tersebut, Hughes dalam Yuniningsih (2025) menegaskan bahwa administrasi publik adalah proses penyediaan layanan kepada masyarakat serta pelaksanaan kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah.

Berdasarkan pemaparan dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan sebuah proses kerjasama yang melibatkan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Konsep ini tidak terbatas pada kegiatan birokrasi semata, melainkan mencakup aspek pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan yang berdasar pada rasionalitas tertentu. Administrasi publik dapat dipahami sebagai upaya pemanfaatan teori dan proses manajemen, politik, dan hukum untuk memenuhi tujuan pemerintahan. Hal ini meliputi berbagai fungsi pengaturan, pelayanan terhadap masyarakat, dan pengelolaan sumber daya manusia untuk mendukung terwujudnya tujuan pemerintahan.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Perkembangan dan perubahan dalam bidang administrasi publik dapat dipahami melalui analisis terhadap pergeseran paradigma yang terjadi di dalamnya. Kuhn dalam Yuniningsih (2025) menyebutkan bahwa paradigma merupakan kerangka cara pandang terhadap suatu fenomena yang memuat nilai-nilai, metode, serta prinsip dasar dalam menyelesaikan persoalan. Seiring berjalannya waktu dan semakin kompleksnya kebutuhan serta pemikiran masyarakat, paradigma tersebut dapat berubah dan berkembang.

Sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi publik terus mengalami transformasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, seperti kemajuan teknologi dan perubahan sosial. Karena itu, administrasi publik dituntut untuk menyesuaikan diri dengan paradigma yang berlaku agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Menurut Henry dalam Yuniningsih (2025), perjalanan perkembangan administrasi publik dapat dikelompokkan ke dalam enam paradigma utama, yaitu dikotomi politik-administrasi, prinsip-prinsip administrasi, administrasi negara sebagai cabang ilmu politik, administrasi negara sebagai cabang ilmu administrasi, administrasi negara, dan administrasi publik dalam perspektif governance.

Pada paradigma pertama (1900–1926), yaitu dikotomi antara politik dan administrasi, terdapat pemisahan yang tegas antara urusan politik dan administrasi. Administrasi dipandang sebagai kegiatan teknis yang harus dijalankan secara profesional tanpa campur tangan politik. Memasuki paradigma kedua (1927–1937),

yang dikenal sebagai prinsip-prinsip administrasi, fokus berpindah pada upaya menemukan prinsip-prinsip universal dalam administrasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Paradigma ketiga (1950–1970), administrasi sebagai bagian dari ilmu politik, memandang bahwa administrasi publik tidak dapat dilepaskan dari ranah politik. Hal ini disebabkan karena kebijakan publik lahir dari keputusan-keputusan politik yang kemudian harus dilaksanakan oleh lembaga administrasi pemerintahan.

Berlanjut ke paradigma *keempat* (1956–1970), administrasi dipahami sebagai bagian dari ilmu administrasi, yang mulai menerapkan prinsip-prinsip manajemen dan teori organisasi dalam penyelenggaraan administrasi negara. Pada tahap ini, administrasi publik didorong untuk menjadi lebih ilmiah dan berbasis riset dalam setiap proses pengambilan keputusannya. Kemudian, paradigma kelima (1970-an) yang disebut administrasi negara sebagai administrasi negara, berusaha memperjelas batasan-batasan dalam kajian administrasi publik dengan lebih memusatkan perhatian pada teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik. Paradigma ini menempatkan perhatian besar pada penanganan persoalan publik dan pengelolaan kebijakan secara lebih sistematis.

Paradigma keenam yang merupakan paradigma terbaru (1990-sekarang), yaitu administrasi publik sebagai *governance*, menitikberatkan pada penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, dan demokratis. Paradigma ini melibatkan tiga komponen utama yaitu pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam proses pemenuhan kebutuhan publik. Dalam kerangka ini, pemerintah tidak lagi

menjadi aktor tunggal yang paling berkuasa, melainkan berperan sebagai fasilitator yang membangun kerja sama dengan berbagai pihak, guna menciptakan layanan publik yang lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perjalanan administrasi publik sebagai disiplin ilmu telah mengalami transformasi signifikan melalui berbagai paradigma yang berkembang seiring dengan perubahan lingkungan, teknologi, dan tuntutan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Kuhn dalam Yuniningsih (2025), paradigma merupakan kerangka cara pandang yang berisi nilai-nilai, metode, dan prinsip dasar dalam penyelesaian masalah. Henry dalam Yuniningsih (2025) mengidentifikasi enam paradigma utama yang menggambarkan evolusi administrasi publik dari waktu ke waktu.

Dalam perkembangan ilmu administrasi publik, paradigma-paradigma yang telah terbentuk mencerminkan evolusi pemikiran tentang bagaimana negara berinteraksi dengan masyarakat dan bagaimana layanan publik dikelola. Melihat topik penelitian tentang implementasi kebijakan *Green Campus* di Universitas Diponegoro, paradigma yang paling relevan adalah paradigma keenam, yaitu administrasi publik sebagai governance (1990-sekarang).

Paradigma governance sangat cocok dengan penelitian ini karena beberapa alasan fundamental. Pertama, paradigma ini memandang administrasi publik tidak hanya sebagai aktivitas pemerintah semata, tetapi melibatkan jaringan aktor yang lebih luas, termasuk institusi pendidikan seperti universitas. Dalam konteks *Green Campus*, Undip berperan sebagai institusi publik yang menjalankan fungsi governance dalam pengelolaan lingkungan kampus. Kedua, Implementasi kebijakan *Green Campus* di

Undip juga mencerminkan pola kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pimpinan universitas, fakultas, departemen, hingga mahasiswa dan masyarakat sekitar. Selain itu, kebijakan ini juga melibatkan kerjasama dengan pemerintah dan lembaga internasional, seperti yang tercermin pada partisipasi Undip dalam *UI GreenMetric*.

Ketiga, paradigma governance memberikan perhatian pada aspek keberlanjutan (*sustainability*) dan tanggung jawab lingkungan sebagai bagian dari tata kelola yang baik. Konsep *Green Campus* itu sendiri merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan yang menjadi salah satu fokus utama dalam paradigma governance. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dalam konteks manajemen universitas. Keempat, paradigma governance memperhatikan mekanisme akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi yang merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan *Green Campus*. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana UNDIP menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam implementasi kebijakan lingkungannya.

1.6.4 Kebijakan Publik

Dalam konteks kebijakan publik, diketahui bahwa pembentukan kebijakan pemerintah pada dasarnya bertujuan sebagai solusi atas berbagai permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Masalah-masalah tersebut muncul dan menjadi perhatian publik ketika terdapat kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi atau belum dapat direalisasikan dengan baik. Dengan kata lain, kesenjangan antara harapan atau kebutuhan masyarakat dengan kondisi aktual yang ada menciptakan permasalahan

yang kemudian mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tepat sebagai upaya penyelesaiannya.

Chandler dan Plano (dalam Pasolog, 2016:38) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara strategis guna menyelesaikan persoalan publik maupun pemerintahan. Selain itu, kebijakan publik juga dipandang sebagai bentuk investasi pemerintah yang berorientasi jangka panjang untuk mendukung kelompok masyarakat yang kurang berdaya agar tetap dapat hidup layak dan berpartisipasi dalam kehidupan pemerintahan. Sementara itu, Dunn (dalam Pasolong, 2016:39) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian pilihan yang saling berkaitan dan dibuat oleh lembaga ataupun pejabat pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Perumusan kebijakan publik dapat dipandang sebagai proses yang rumit dan berfaktor penentu keberhasilan majemuk, karena melibatkan berbagai tahapan dan komponen yang memerlukan analisis mendalam. Dalam konteks kebijakan publik, kompleksitas ini tercermin dari rangkaian proses yang harus dilalui secara sistematis. Mengacu pada pemikiran yang dijabarkan oleh Winarno (2014:32-34), penyusunan kebijakan publik terdiri dari beberapa fase yang terstruktur dan saling berkaitan satu sama lain. Setiap tahapan memiliki karakteristik dan fungsi spesifik dalam keseluruhan proses pembentukan kebijakan publik yang efektif. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut.

a) Tahap Formulasi Kebijakan

Permasalahan yang telah masuk dalam agenda kebijakan selanjutnya akan dibahas oleh perumus kebijakan. Permasalahan tersebut kemudian diidentifikasi dan dicari alternatif penyelesaian yang paling tepat. Berbagai alternatif kebijakan yang tersedia akan saling bersaing untuk dipilih sebagai solusi atas masalah yang dihadapi. Pada tahap ini, setiap actor kebijakan berupaya mengajukan pilihan penyelesaian yang dianggap paling efektif.

b) Tahap Adopsi Kebijakan

Setelah berbagai alternatif kebijakan diajukan oleh para perumus kebijakan, akan dilakukan proses seleksi hingga akhirnya dipilih satu kebijakan untuk diterapkan. Pemilihan ini mendapatkan legitimasi melalui dukungan dari sebagian besar anggota badan legislatif, kesepakatan di antara para pimpinan lembaga terkait, atau berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan. Proses adopsi kebijakan ini menjadi tahap krusial yang menentukan arah tindakan yang akan diambil dari beragam opsi yang telah dipertimbangkan sebelumnya.

c) Tahap Implementasi Kebijakan

Sebuah program kebijakan hanya akan menjadi dokumentasi formal yang tersimpan di kalangan elit jika tidak diterapkan dalam praktik nyata. Kebijakan yang telah ditetapkan sebagai solusi kemudian perlu diimplementasikan secara nyata melalui lembaga administrasi dan aparat pemerintah pada tingkat operasional. Pelaksanaan kebijakan tersebut dijalankan oleh berbagai unit administratif dengan memanfaatkan sumber daya manusia maupun keuangan

yang tersedia. Dalam tahap implementasi sering muncul perbedaan kepentingan, sehingga ada kebijakan yang memperoleh dukungan dari pelaksana di lapangan, namun ada pula yang menghadapi hambatan atau penolakan.

d) Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap evaluasi, kebijakan yang telah dilaksanakan akan dinilai untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan ukuran atau kriteria tertentu sebagai dasar penilaian keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Setelah memahami berbagai tahapan dalam kebijakan publik, selanjutnya perlu dibahas secara khusus mengenai implementasi kebijakan yang merupakan tahapan krusial dalam menentukan keberhasilan kebijakan. Implementasi kebijakan tidak sekedar proses teknis untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan, melainkan merupakan dinamika kompleks yang melibatkan berbagai actor, sumber daya, dan kondisi lingkungan yang berinteraksi. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai implementasi kebijakan menjadi hal yang penting untuk menilai efektivitas kebijakan publik dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.

1.6.5 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap penting dalam keseluruhan proses kebijakan publik sekaligus menjadi bidang kajian yang memiliki peran strategis. Signifikansinya terletak pada kenyataan bahwa sebaik apapun suatu kebijakan

dirancang, jika tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan matang dalam pelaksanaannya, maka sasaran kebijakan tersebut tidak akan dapat tercapai. Dengan demikian, implementasi menjadi jembatan penentu antara konsep kebijakan yang ideal dengan realisasi tujuan yang diharapkan dalam pemecahan masalah publik. Ripley dan Franklin (Winarno, 2014:145) menyatakan bahwa implementasi merupakan proses yang terjadi setelah undang-undang atau kebijakan ditetapkan yang di dalamnya mencakup pemberian kewenangan terhadap program, kebijakan, manfaat, maupun keluaran nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

Konsep implementasi sendiri mengacu pada rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan tujuan program serta hasil yang ingin dicapai oleh pemerintah. Implementasi melibatkan berbagai tindakan, maupun tidak adanya tindakan tertentu yang dilakukan oleh banyak actor terutama birokrat untuk menjalankan program yang telah ditetapkan. Gordon (dalam Pasolong, 2016:57) menjelaskan bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai aktivitas yang diarahkan pada realisasi program. Sementara itu, Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2014:146) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, baik dari sektor pemerintah maupun swasta guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.

Implementasi kebijakan dapat dikategorikan menjadi tiga pendekatan utama: pendekatan *top down*, pendekatan *bottom up*, dan pendekatan campuran yang mengintegrasikan kedua metode tersebut. Dalam pendekatan *top down*, institusi pemerintah menyusun regulasi dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh masyarakat.

Sementara itu, pendekatan bottom up menempatkan aspirasi masyarakat sebagai sumber utama, dimana pemerintah menampung keinginan tersebut dan merumuskannya menjadi peraturan melalui otoritas yang dimiliki dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif.

Berdasarkan karakteristik implementasi kebijakan *Green Campus* di Universitas Diponegoro, pendekatan yang digunakan cenderung menggunakan pendekatan campuran yang mengintegrasikan elemen pendekatan top down dan bottom up. Pendekatan top down terlihat dari adanya regulasi dan kebijakan formal yang dikeluarkan oleh pimpinan universitas atau kementerian terkait sebagai dasar implementasi *Green Campus*. Kebijakan ini kemudian dijalankan sebagai dasar implementasi *Green Campus*. Kebijakan ini kemudian dijalankan melalui struktur birokrasi yang ada di universitas, mulai dari tingkat rektorat hingga fakultas dan departemen. Penetapan target dan standar yang harus dicapai dalam *UI GreenMetric* juga mencerminkan karakteristik pendekatan top down, dimana ada kerangka kebijakan yang jelas dari atas yang harus diimplementasikan oleh unit-unit bawahnya.

Sementara itu, aspek pendekatan bottom up tercermin dalam pelibatan berbagai pemangku kepentingan di lingkungan kampus seperti mahasiswa, dosen, dan staf dalam implementasi *Green Campus*. Berbagai inisiatif lingkungan yang muncul dari level fakultas, kelompok mahasiswa, atau unit kerja tertentu menunjukkan adanya ruang partisipasi dari bawah. Pendekatan campuran ini memungkinkan adanya keseimbangan antara arahan kebijakan yang jelas dari pimpinan universitas dengan ruang partisipasi dan inovasi dari seluruh civitas akademika. Kombinasi ini menjadi

penting mengingat kompleksitas isu lingkungan dan keberlanjutan yang membutuhkan tidak hanya kebijakan tegas dari pimpinan, tetapi juga kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh elemen kampus.

Terdapat berbagai model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satu model klasik diperkenalkan oleh Van Meter dan Van Horn pada tahun 1975, dalam Winarno (2014:158-168) model tersebut menjelaskan adanya enam variable yang memengaruhi hubungan antara kebijakan dan kinerja implementasi, antara lain yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan;
2. Sumber daya kebijakan;
3. Komunikasi antar lembaga dan aktivitas pelaksanaan;
4. Karakteristik organisasi pelaksana;
5. Kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik;
6. Kecenderungan atau sikap para pelaksana kebijakan

Selain itu, Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) melihat implementasi sebagai upaya untuk melaksanakan keputusan kebijakan yang telah ditetapkan. Mazmanian dan Sabatier (dalam Nugroho, 2009:505) membagi proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variable utama, yaitu:

1. Variabel independen adalah tingkat mudah atau sulitnya suatu permasalahan untuk dikendalikan. Variable ini berkaitan dengan aspek teori, teknis pelaksanaan, keragaman objek, hingga bentuk perubahan yang ingin diwujudkan.

2. Variabel *intervening* yaitu kemampuan kebijakan dalam mengatur proses implementasi. Variabel ini mencakup kejelasan dan konsistensi tujuan, penggunaan teori kausal, ketetapan alokasi sumber daya, keterpaduan hierarki antar lembaga pelaksana, aturan pelaksanaa, proses rekrutmen pelaksana, serta keterbukaan terhadap pihak luar. Selain itu variabel ini juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap kelompok sasaran, dukungan pejabat tingkat atass, hingga komitmen dan kualitas kepemimpinan pelaksana.
3. Variabel dependen yaitu tahapan hasil dari proses implementasi kebijakan yang meliputi pemahaman lembaga pelaksana, kepatuhan kelompok sasaran, hasil nyata kebijakan, penerimaan terhadap hasil kebijakan, hingga kemungkinan dilakukannya revisi terhadap kebijakan yang telah diterapkan.

Wibawa (dalam Nugroho, 2009:510) menjelaskan bahwa model Grindle dipengaruhi oleh isi kebijakan serta konteks implementasinya. Model ini menekankan bahwa implementasi baru dapat berlangsung setelah kebijakan ditransformasikan ke dalam bentuk pelaksanaan yang nyata. Nugroho (2009:520) menyebutkan beberapa unsur penting dalam isi kebijakan, yaitu:

1. Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan;
2. Jenis manfaat yang dihasilkan;
3. Tingkat perubahan yang ingin dicapai;
4. Kedudukan atau posisi pembuat kebijakan;
5. Pihak pelaksana program;

6. Sumber daya yang digunakan.

Sedangkan konteks implementasinya meliputi:

1. Karakteristik lembaga dan penguasa;
2. Kepatuhan dan daya tanggap.

Menurut teori Edwards III (sebagaimana dikutip dalam Mulyadi, 2014), kajian tentang implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam bidang administrasi publik, termasuk dalam ranah kebijakan publik secara umum. Implementasi kebijakan dipandang sebagai fase krusial yang menghubungkan antara proses perumusan kebijakan dengan dampak kebijakan tersebut pada masyarakat yang menjadi sarannya. Edwards III secara detail menguraikan empat faktor kunci yang berperan dalam proses implementasi kebijakan, yang masing-masing nantinya dapat menentukan keberhasilan terhadap keberhasilan penerapan suatu kebijakan dalam konteks administrasi publik. Keempat faktor tersebut diantaranya sebagai berikut:

a) Komunikasi

Komunikasi memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif dapat tercapai apabila para pengambil keputusan memahami secara jelas hal-hal yang perlu dilaksanakan. Pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab hanya dapat berjalan dengan baik apabila komunikasi berlangsung secara efektif. Oleh sebab itu, setiap keputusan maupun pedoman implementasi harus disampaikan kepada pihak yang tepat. Selain itu, informasi yang dikomunikasikan juga perlu memenuhi unsur ketepatan, kejelasan, dan konsistensi.

b) Sumber daya

Menurut Edward III (dalam Rizky, Johnny, & Very 2023) Setiap kebijakan harus didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia berkaitan dengan kecukupan jumlah serta kualitas pelaksana yang mampu menjangkau kelompok sasaran. Sementara itu, sumber daya finansial berkaitan dengan ketersediaan dana atau modal yang mendukung pelaksanaan program maupun kebijakan.

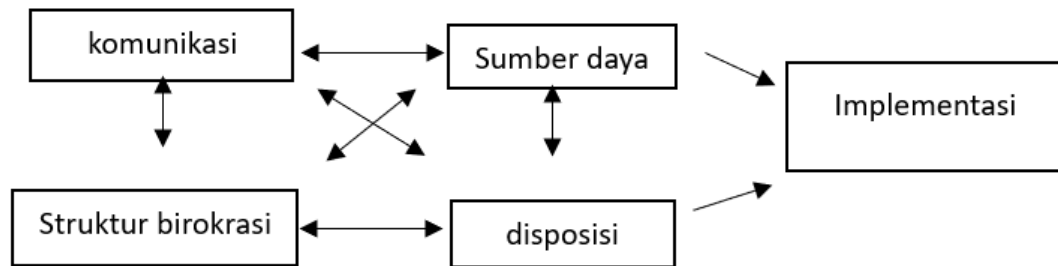
c) Disposisi

Disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan publik. Supaya implementasi berjalan secara efektif, para pelaksana tidak hanya dituntut memahami tugas yang harus dilakukan, tetapi juga memiliki kemampuan dan kemauan untuk menjalankannya dengan baik. Hal tersebut penting agar pelaksanaan kebijakan di lapangan dapat terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan.

1. Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2008:153), struktur birokrasi merupakan faktor yang turut memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Walaupun sumber daya tersedia dan pelaksana memahami tugasnya, implementasi kebijakan tetap berpotensi mengalami hambatan apabila struktur birokrasi tidak mendukung. Kebijakan yang bersifat kompleks memerlukan koordinasi antarpihak secara efektif. Oleh karena itu, birokrasi

sebagai pelaksana kebijakan harus mampu mendukung pelaksanaan kebijakan melalui koordinasi dan pengorganisasian yang baik.



Gambar 1.7 Model Implementasi Kebijakan Edward III

Sumber: Mulyadi (2014)

Dalam kajian implementasi kebijakan publik, terdapat beberapa model yang telah diakui dan banyak digunakan oleh para peneliti, di antaranya model Van Meter dan Van Horn, Model Mazmanian dan Sabatier, Model Grindle, serta Model Edward III. Setelah melakukan peninjauan terhadap berbagai model tersebut, penelitian ini akan menggunakan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III sebagai kerangka analisis untuk mengkaji implementasi kebijakan *Green Campus* di Universitas Diponegoro.

Model Edward III dipilih karena menawarkan kerangka analisis yang komprehensif namun tetap fokus pada faktor-faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Edward III mengidentifikasi empat faktor kunci yang saling berinteraksi dan berpengaruh langsung terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.

Dalam konteks implementasi kebijakan *Green Campus* di Undip, faktor komunikasi akan digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan dan program lingkungan dikomunikasikan dari tingkat pimpinan universitas hingga ke seluruh civitas akademika. Aspek ini mencakup kejelasan informasi, konsistensi pesan, dan saluran komunikasi yang digunakan dalam menyebarluaskan kebijakan *Green Campus*. Variabel sumber daya akan membantu mengidentifikasi ketersediaan dan kecukupan sumber daya manusia, finansial, dan teknologi yang dibutuhkan untuk menjalankan program-program *Green Campus* di Undip. Analisis ini penting untuk memahami apakah terdapat kesenjangan sumber daya yang menjadi penghambat implementasi, terutama pada aspek-aspek yang masih menunjukkan peringkat rendah dalam penilaian *UI GreenMetric* seperti pengelolaan limbah dan sumber daya air.

Disposisi atau sikap pelaksana akan dianalisis untuk memahami persepsi, komitmen, dan dukungan dari para implementor kebijakan, mulai dari pimpinan universitas, dekan fakultas, kepala departemen, hingga staf dan mahasiswa. Faktor penentu keberhasilan ini akan membantu mengungkap apakah terdapat perbedaan tingkat komitmen yang mempengaruhi keberhasilan implementasi di berbagai aspek program *Green Campus*. Struktur birokrasi akan dikaji untuk melihat bagaimana mekanisme koordinasi, pembagian tugas, dan standard operating procedures (SOP) dalam implementasi kebijakan *Green Campus* di Undip. Analisis ini akan membantu memahami apakah struktur organisasi yang ada mendukung atau justru menghambat implementasi kebijakan secara efektif.

Keunggulan model Edward III untuk penelitian ini terletak pada kemampuannya menganalisis secara sistematis berbagai faktor internal yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yang sangat relevan dengan kondisi institusi pendidikan tinggi seperti Undip. Model ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang berkontribusi pada keberhasilan implementasi di beberapa aspek (seperti *education and research* serta *energy and climate change*) serta faktor-faktor yang menghambat implementasi di aspek lainnya (seperti *waste management* dan *water resources*). Dengan menggunakan model Edward III, dengan menggunakan model implementasi Edward III penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan *Green Campus* di Universitas Diponegoro. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang dapat mendukung peningkatan efektivitas implementasi kebijakan *Green Campus* di masa mendatang. Model Edward III yang digunakan dalam penelitian ini juga dinilai sesuai dengan paradigma governance karena menyoroti aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang mencerminkan kompleksitas tata kelola.

1.6.6 Green Campus

Green Campus memiliki potensi intelektual serta sumber daya yang memungkinkan integrasi pengetahuan dan nilai-nilai lingkungan ke dalam visi, misi maupun program kampus. *Green Campus* dirancang untuk melahirkan pemimpin masa depan, baik itu dalam bidang politik, bisnis, pertanian, maupun masyarakat umum yang

memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Selain itu, *Green Campus* juga harus menjadi contoh nyata dalam penerapan integrasi ilmu lingkungan ke dalam aspek manajemen dan praktik terbaik pembangunan berkelanjutan (Hudaini dalam Puspadi, 2016). Adapun menurut (Gatot Suhirman, 2017) pengertian *Green Campus* atau kampus hijau tidak hanya dimaknai sebagai banyaknya pepohonan atau dominasi unsur hijau di lingkungan kampus. Lebih dari itu, konsep kampus hijau mencakup sejauh mana civitas akademik mampu menggunakan sumber daya yang tersedia di lingkungan kampus secara optimal, efektif, dan efisien

Menurut Nur Diyanti Santoso (2017) dalam (Abdurrahman, 2003) konsep *Green Campus* atau kampus hijau merupakan bagian dari pendekatan yang mendukung penerapan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan itu sendiri dimaknai sebagai proses pembangunan yang dilaksanakan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan hidup. Keterkaitan antara *Green Campus* dan konsep pembangunan berkelanjutan terletak pada penerapan berbagai aktivitas ramah lingkungan yang difokuskan pada lingkungan perguruan tinggi. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi fondasi utama dalam mengatur sistem perlindungan lingkungan di Indonesia. UU ini mengatur berbagai aspek mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan serta menetapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Di Indonesia, telah ada satu standar *Green Campus* yang diakui oleh banyak universitas, baik dalam negeri maupun luar negeri. *UI GreenMetric*, yang dikembangkan oleh Universitas Indonesia menjadi standar tersebut. Ini merupakan sistem pemeringkatan universitas pertama di dunia yang menilai perguruan tinggi berdasarkan sejauh mana komitmen mereka dalam mengelola lingkungan kampus secara berkelanjutan. Adapun *UI GreenMetric* menerapkan prinsip yang sama dengan menilai universitas berdasarkan upaya mereka dalam mengurangi jejak ekologis melalui berbagai indikator berkelanjutan.

UI GreenMetric mengembangkan enam kategori utama dalam penilaian *Green Campus* yang mencakup aspek fisik, operasional, dan akademik dari sebuah universitas. Keenam kategori tersebut dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang komitmen dan kinerja universitas dalam implementasi kebijakan keberlanjutan. Kategori pertama, *setting and infrastructure* yaitu menilai aspek fisik. Hal ini mencakup seperti total luas area kampus, persentase area terbuka hijau, luas area yang dialokasikan untuk ruang terbuka, anggaran universitas untuk upaya berkelanjutan, dan jumlah total populasi kampus.

Kategori kedua, *energy and climate* yaitu fokus pada upaya universitas dalam pengelolaan energi dan mitigasi perubahan iklim. Indikator ini meliputi penggunaan peralatan hemat energi, implementasi kebijakan energi terbarukan di kampus, dan elemen implementasi bangunan hijau.

Kategori ketiga, *waste management* mengukur efektivitas pengelolaan limbah dan sampah di lingkungan kampus. Indikator yang dinilai mencakup program daur

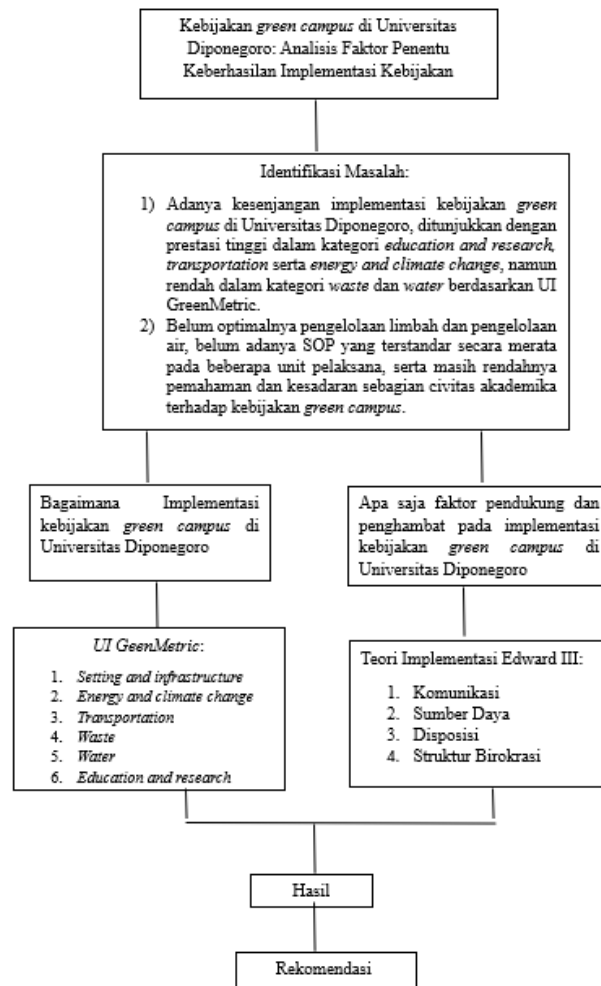
ulang sampah, program pengurangan penggunaan kertas dan plastik sekali pakai, pengelolaan sampah organik maupun anorganik, pengelolaan limbah beracun, dan kebijakan pengelolaan limbah cair. Kategori keempat, *water management* menilai kebijakan dan praktik pengelolaan sumber daya air di kampus. Indikator ini meliputi konservasi air, implementasi teknologi ramah air, kualitas air minum, penggunaan air daur ulang, dan pengelolaan air hujan.

Kategori kelima, *transportation* mengukur upaya universitas dalam mengurangi dampak transportasi terhadap lingkungan. Indikator yang dinilai mencakup kebijakan transportasi berkelanjutan, penggunaan kendaraan ramah lingkungan di kampus, fasilitas untuk pejalan kaki dan pesepeda, dan sebagainya. Kategori keenam, *education and research* menilai peran universitas dalam mengembangkan pengetahuan dan kesadaran tentang keberlanjutan. Kategori ini meliputi persentase mata kuliah berkaitan dengan lingkungan dan keberlanjutan, total dana penelitian untuk topik lingkungan, jumlah publikasi ilmiah tentang lingkungan, maupun organisasi mahasiswa yang bergerak di bidang lingkungan. Meskipun merupakan kategori yang menunjukkan prestasi baik dalam penilaian *UI GreenMetric*, tampaknya tidak memiliki regulasi khusus dalam daftar yang ada. Hal ini mungkin karena aktivitas pendidikan dan penelitian lingkungan lebih bersifat akademik dan terintegrasi dalam kurikulum serta program penelitian, sehingga tidak memerlukan regulasi administratif khusus seperti aspek operasional lainnya.

Keenam indikator *UI GreenMetric* ini saling terkait dan memberikan framework komprehensif untuk menilai implementasi *Green Campus*. Dalam konteks

penelitian tentang Universitas Diponegoro, indikator-indikator ini dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami capaian dan tantangan dalam implementasi kebijakan *Green Campus*, khususnya dalam mengidentifikasi area yang sudah berhasil diimplementasikan dengan baik dan area yang masih memerlukan perbaikan. Meskipun SE Rektor telah diterbitkan untuk setiap kategori, namun belum semua pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan formal belum tentu menjamin keberhasilan implementasi, sehingga perlu dikaji dari model implementasi Edward III.

1.7 Kerangka Pemikiran



1.8 Operasionalisasi Konsep

Implementasi kebijakan *Green Campus* adalah proses pelaksanaan dan penerapan kebijakan kampus berkelanjutan yang melibatkan serangkaian aktivitas untuk mentransformasikan tujuan dan sasaran kebijakan lingkungan menjadi tindakan nyata melalui berbagai program dan kegiatan di lingkungan universitas. Implementasi ini mencakup upaya sistematis untuk mewujudkan kampus yang ramah lingkungan dengan mempertimbangkan aspek fisik, operasional, dan akademik yang berkelanjutan sesuai dengan standar pengukuran *UI GreenMetric World University Rankings*.

1. Komunikasi, Faktor komunikasi dilihat melalui tiga faktor penentu keberhasilan yaitu: transmisi, kejelasan, dan konsistensi.
 - a. Transmisi dilihat dari bagaimana kebijakan *Green Campus* dikomunikasikan dari pembuat kebijakan kepada implementor di berbagai unit kerja universitas.
 - b. Kejelasan dilihat dari seberapa jelas pemahaman implementor tentang isi kebijakan, tujuan, dan mekanisme implementasi *Green Campus*.
 - c. Konsistensi dilihat dari keseragaman informasi yang diterima oleh berbagai pihak terkait implementasi.
2. Sumber daya, Faktor sumber daya dilihat melalui tiga faktor penentu keberhasilan yaitu: staf, anggaran, dan fasilitas.
 - a. Staf dilihat dari jumlah dan kompetensi SDM pengelola program *Green Campus*.

- b. Anggaran dilihat dari kecukupan alokasi dana untuk program keberlanjutan.
3. Fasilitas dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.
- a. Disposisi, Faktor disposisi dilihat melalui dua faktor penentu keberhasilan yaitu: komitmen dan sikap implementor.
 - b. Komitmen dilihat dari kesungguhan dan konsistensi pimpinan universitas dalam mendukung kebijakan *Green Campus*.
 - c. Sikap implementor dilihat dari penerimaan dan dukungan civitas akademika terhadap program-program keberlanjutan yang dijalankan.
4. Struktur Birokrasi, faktor struktur birokrasi dilihat melalui dua faktor penentu keberhasilan yaitu: SOP dan fragmentasi.
- a. SOP dilihat dari ketersediaan dan kualitas prosedur operasional standar dalam implementasi program *Green Campus*.
 - b. Fragmentasi dilihat dari pola pembagian tanggung jawab dan koordinasi antar unit kerja dalam mengimplementasikan kebijakan.

1.8.1 Fenomena Penelitian

Tabel 1.2 Tabel Fenomena Penelitian

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang diamati	Operasional Pedoman Wawancara
Implementasi Kebijakan <i>Green Campus</i>	1. Komunikasi	a. Transmisi dilihat dari bagaimana kebijakan <i>Green Campus</i> dikomunikasikan dari pembuat kebijakan kepada implementor di berbagai unit kerja universitas.	1. Bagaimana cara yang dilakukan pimpinan Universitas Diponegoro dalam mengkomunikasikan kebijakan <i>Green Campus</i> kepada civitas akademika?
		b. Kejelasan dilihat dari seberapa jelas pemahaman implementor tentang isis kebijakan, tujuan, dan mekanisme implementasi <i>Green Campus</i> .	2. Seberapa jelas informasi yang anda terima mengenai tujuan dan sasaran dari kebijakan <i>Green Campus</i> di Universitas Diponegoro?

		c. Konsistensi dilihat dari keseragaman informasi yang diterima oleh berbagai pihak terkait implementasi.	3. Apakah ada perbedaan informasi yang anda terima dari berbagai sumber mengenai implementasi <i>Green Campus</i> ?
	2. Sumber Daya	a. Staf dilihat dari jumlah dan kompetensi SDM pengelola program <i>Green Campus</i> .	1. Apakah ada pelatihan yang diberikan kepada staf atau petugas terkait implementasi kebijakan <i>Green Campus</i> ? Seberapa memadai pelatihan tersebut?

		b. Anggaran dilihat dari kecukupan alokasi dana untuk program keberlanjutan.	2. Apakah dana yang tersedia cukup untuk mendukung implementasi kebijakan <i>Green Campus</i> ? Bisa menjelaskan lebih lanjut?
		c. Fasilitas dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana pendukung	3. Bagaimana ketersediaan fasilitas pendukung untuk program <i>Green Campus</i> seperti misalnya tempat sampah terpilah, atau sistem daur ulang air?

	3. Disposisi	a. Komitmen dilihat dari kesungguhan dan konsistensi pimpinan universitas dalam mendukung kebijakan <i>Green Campus</i> .	1. Bagaimana komitmen pimpinan universitas terhadap implementasi kebijakan <i>Green Campus</i> ?
		b. Sikap implementor dilihat dari penerimaan dan dukungan civitas akademika terhadap program-program keberlanjutan yang dijalankan.	2. Bagaimana sikap dan respon civitas akademika terhadap program-program <i>Green Campus</i> yang dijalankan? Apakah ada sistem penghargaan atau sanksi terkait implementasi kebijakan <i>Green Campus</i> tersebut?

	4. Struktur Birokrasi	a. SOP dilihat dari ketersediaan dan kualitas prosedur operasional standar dalam implementasi program <i>Green Campus</i> .	1. Apakah terdapat SOP yang jelas untuk pelaksanaan program-program <i>Green Campus</i> ? Bisa dijelaskan?
		b. Fragmentasi dilihat dari pola pembagian tanggung jawab dan koordinasi antar unit kerja dalam mengimplementasikan kebijakan.	2. Bagaimana pembagian tanggung jawab antar unit kerja dalam implementasi kebijakan <i>Green Campus</i> ? Bagaimana koordinasi dilakukan antar unit kerja dalam implementasi program <i>Green Campus</i> ?

Fenomena penelitian ini mengacu pada empat faktor utama dalam model implementasi kebijakan Edward III, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang kemudia dioperasionalisasikan menjadi pertanyaan-pertanyaan spesifik untuk menggali data mengenai implementasi kebijakan *Green Campus* di Universitas Diponegoro, khususnya untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi.

1.9 Argumen Penelitian

Universitas Diponegoro sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia, telah menunjukkan komitmen terhadap isu lingkungan dengan mengimplementasikan berbagai inisiatif kebijakan *Green Campus*. Namun demikian, implementasi kebijakan *Green Campus* di perguruan tinggi seringkali menghadapi berbagai tantangan kompleks yang mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan keberlanjutan lingkungan.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa meskipun Universitas Diponegoro memiliki komitmen tinggi terhadap implementasi *Green Campus* sebagaimana tercermin dalam berbagai kebijakan dan program yang telah dicanangkan, namun dalam praktik implementasinya masih terdapat gap antara perencanaan kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan. Gap ini bisa disebabkan oleh faktor komunikasi yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, disposisi implementor yang beragam, serta struktur birokrasi yang belum sepenuhnya mendukung. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi secara komprehensif faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan *Green Campus* di Universitas Diponegoro, sehingga dapat memberikan rekomendasi strategis bagi perbaikan implementasi kebijakan di masa mendatang.

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan metode atau cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, serta menafsirkan data guna mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik permasalahan dan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Pendekatan penelitian dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan campuran, yang masing-masing memiliki karakteristik dan keunggulannya sendiri (Sugiyono, 2016).

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan tersebut dipilih karena mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan *Green Campus* di Universitas Diponegoro. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan berbagai fenomena yang terjadi, baik fenomena alamiah maupun fenomena yang muncul akibat aktivitas manusia. Fenomena tersebut dapat berupa aktivitas, perubahan, karakteristik, hubungan, persamaan, maupun perbedaan antar fenomena (Sukmadinata, 2006).

1.10.2 Lokus Penelitian

Lokus penelitian adalah tempat ketika akan diadakannya sebuah penelitian atau observasi dalam rangka untuk memperoleh sebuah data yang akurat untuk sebuah penelitian (Sugiyono, 2013). Penelitian ini akan dilaksanakan di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah yang meliputi berbagai unit kerja dan fakultas yang terlibat dalam implementasi kebijakan *Green Campus*.

1.10.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data merujuk pada bentuk atau kategori data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian. Secara umum, data dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu data kualitatif dan kuantitatif (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian, proses pengumpulan sumber data menjadi

salah satu komponen penting. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan penelitian dan berkaitan dengan variabel yang diteliti. Sementara itu, data sekunder berasal dari berbagai sumber yang telah tersedia sebelumnya (Sekaran, Uma dan Bougie, 2017).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan selama proses penelitian dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan *Green Campus* di Universitas Diponegoro. Sedangkan, data sekunder akan diperoleh melalui kumpulan dari berbagai informasi baik dari internet berupa web resmi maupun dokumen lainnya.

1.10.4 Pemilihan Informan

Pada penelitian ini, teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Menurut (Sugiyono, 2012:54) menjelaskan bahwa purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa informan yang dipilih memiliki pengetahuan paling relevan terkait objek penelitian sehingga dapat membantu peneliti memperoleh informasi yang dibutuhkan secara lebih mendalam. Pemilihan informan juga dilakukan karena informan memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Informan yang dipilih dalam penelitian ini meliputi:

1. Direktur Reputasi Kemitraan dan Konektivitas Global
2. Ketua LPPM
3. Anggota Direktorat Reputasi Kemitraan dan Konektivitas Global
4. Ketua UPT K3L
5. Koordinasi Tim Kampus Sehat FISIP

1.10.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian. Kualitas data yang dikumpulkan

akan sangat memengaruhi hasil penelitian, sehingga teknik pengumpulan data perlu dilakukan secara tepat dan sistematis. Beberapa teknik yang umum digunakan meliputi survei, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Misalnya, dalam penelitian tentang implementasi *Green Campus*, wawancara dapat dilakukan untuk mengumpulkan pendapat stakeholder mengenai efektivitas kebijakan, sementara observasi langsung dapat memberikan gambaran nyata tentang kondisi fasilitas dan program yang berjalan (Sugiyono, 2020).

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai pandangan dan pengalaman para responden terkait implementasi kebijakan *Green Campus*. Proses wawancara ini dilakukan secara langsung dan lisan, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik kepada para pimpinan unit pelaksana, pengelola program, mahasiswa, dan stakeholder terkait. Pemilihan strategi wawancara ini bertujuan untuk: Mengumpulkan persepsi dan pengalaman terbaru mengenai implementasi kebijakan *Green Campus*; Mengetahui tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam proses implementasi; Memverifikasi dan memperluas informasi yang diperoleh melalui observasi; Mendapatkan rekomendasi untuk perbaikan implementasi kebijakan.

2) Observasi

Pengumpulan data dengan teknik observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung semua kejadian yang terkait dengan implementasi kebijakan *Green Campus* di Universitas Diponegoro. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi secara sistematis mengenai kondisi fisik kampus, program-program yang berjalan, dan interaksi antar stakeholder dalam implementasi kebijakan. Peneliti mencatat semua peristiwa yang terjadi di lapangan, termasuk aktivitas pengelolaan lingkungan, fasilitas

Green Campus, dan respons civitas akademika terhadap program berkelanjutan. Observasi memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung bagaimana kebijakan *Green Campus* diimplementasikan dan bagaimana kondisi aktual di lapangan. Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan fenomena yang terjadi berdasarkan pengamatan langsung dan kondisi nyata implementasi.

3) Dokumentasi

Dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap dari observasi dan wawancara. Peneliti mengumpulkan berbagai dokumen yang terkait dengan implementasi kebijakan *Green Campus*, seperti Surat Edaran Rektu, dokumen kebijakan lingkungan, data *UI GreenMetric*, dan dokumentasi kegiatan *Green Campus*. Dokumentasi ini menjadi penting untuk memberikan bukti empiris yang mendukung informasi dan diperoleh dari observasi dan wawancara.

Berdasarkan ketiga tahapan analisis data tersebut, setiap langkah berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian direduksi dengan memfokuskan hal-hal yang relevan dengan topik penelitian, yaitu analisis faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan *Green Campus* di Universitas Diponegoro. Hasil tersebut selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian naratif, dan pada tahap akhir dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan data serta informasi yang berhasil dihimpun selama proses penelitian.

1.10.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode yang digunakan untuk mengolah dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian untuk menemukan pola dan informasi yang relevan. Misalnya, dalam studi implementasi *Green Campus*, analisis kualitatif dapat digunakan untuk mengekstrak tema dari wawancara dengan stakeholder untuk

mendapatkan wawasan mendalam tentang pengalaman dan tantangan mereka dalam implementasi kebijakan (Sugiyono, 2020).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan beberapa langkah. Mengacu pada teori Miles, Huberman dan Saldana (2014), analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis tematik, di mana peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama dari wawancara dan mengorganisir data berdasarkan kategori yang relevan sesuai dengan model implementasi Edward III. Hasil analisis ini akan mendukung pemahaman tentang faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan *Green Campus* di Universitas Diponegoro. Langkah-langkah analisis data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kondensasi Data

Data yang diperoleh dari lapangan diuraikan oleh penulis dalam bentuk tulisan yang rinci, laporan dirangkum dengan menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, mengubah catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan materi (temuan) empirik lainnya, serta memfokuskan pada hal-hal yang penting berkaitan dengan implementasi kebijakan *Green Campus* berdasarkan empat faktor dalam model Edward III.

2. Penyajian Data

Penulis membuat uraian singkat yang berbentuk narasi dan disajikan dengan bagan, tabel, hubungan antarkategori, dan lainnya. Menguraikan dalam bentuk narasi dalam penyajian data akan lebih mudah dipahami dan lebih mudah untuk menentukan langkah selanjutnya dalam penelitian. Data disajikan sesuai dengan kategorisasi faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data disebut juga dengan penarikan kesimpulan. Penulis mengumpulkan data dengan melihat pola, hubungan, persamaan, perbedaan, dan lain sebagainya sehingga penulis dapat melakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian. Untuk memperdalam penarikan kesimpulan maka dilakukan verifikasi data terfaktual dalam pelaksanaan penelitian ini.

1.10.7 Kualitas Data

Menurut Sugiyono (2018: 363) pada penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, sebuah data dapat dikatakan valid apabila pada data tersebut tidak ditemukan perbedaan antara data yang dimiliki dan dilaporkan oleh peneliti dengan data yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, uji keabsahan data dilakukan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan berbagai sumber, metode, maupun waktu untuk meningkatkan kredibilitas data penelitian.

a. Triangulasi Sumber

Pada triangulasi ini dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber untuk menguji kredibilitas data. Dalam penelitian ini, data dari pimpinan universitas akan dikonfirmasi dengan data dari pengelola program, mahasiswa, dan stakeholder lainnya.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik menggunakan cara dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Teknik yang berbeda dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, atau dokumentasi, dengan cara ini peneliti mendapatkan data dengan hasil yang berbeda namun mungkin maksudnya sama hanya perbedaan sudut pandang.

c. Triangulasi Waktu

Pada teknik ini dapat dilakukan pengecekan data dengan dilakukan metode yang sama seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan waktu yang berbeda karena pada teknik ini waktu menjadi faktor utama dalam kredibilitas data.

Dalam penelitian ini peneliti menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik sebagai langkah untuk menjamin keabsahan data. Pada triangulasi sumber, peneliti melakukan pemeriksaan terhadap informasi yang diperoleh dari beberapa narasumber yang berbeda, yaitu pihak Direktorat Reputasi Global, pengelola *Green Campus*, serta civitas akademika Universitas Diponegoro guna melihat konsistensi data yang diperoleh. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan cara memadukan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi sebagai instrumen pengumpulan data, dimana informasi yang diperoleh dari satu teknik dikonfirmasi kembali melalui teknik lainnya. Setelah data dikumpulkan, peneliti kemudian melakukan proses analisis dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai narasumber, hasil pengamatan langsung di lokasi penelitian serta dokumentasi yang tersedia yaitu recorder dan foto.